**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II B Lubuk Pakam)**

**ROBBY PRAYOGA**

**NPM: 165114010**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Sistem peradilan pidana anak lebih ditekankan pada aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif. Minimnya kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Warga Binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas-II B Lubuk Pakam, Apasaja Faktor-Faktor yang menghambat pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Kelas- II B Lubuk Pakam dan Apa saja upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas-II Lubuk Pakam dalam pembinaan terhadap Warga Binaan anak.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas-II Lubuk Pakam, yaitu dalam hal pelaksanaan pembinaan khususnya pencegahan terjadinya tindak pidana di Lapas Anak, lalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31/1999 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan.

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum terhadap warga binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dengan cara memberikan hak-hak warga binaan Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di Lembaga Pembinana Khusus Anak diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Pasal 14 ayat (1), maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memberikan hak-hak kepada Narapidan Anak telah sesuai.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Warga Binaan Anak, Lembaga Pemasyarakatan**

**ABSTRACT**

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN WHO CONTINUE CRIMINAL CRIMINAL IN JURISDICTION INSTITUTIONS OF CHILDREN CONTENTING CRIMINAL CRIMINAL IN CORRUPTION INSTITUTIONS**

**(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II B Lubuk Pakam)**

**ROBBY PRAYOGA**

**NPM: 165114010**

 Based on Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, children who are placed in the Special Development Institution for Children (LPKA) are also entitled to education without discrimination and the government is responsible for the implementation of this education. When the state is unable to carry out the mandate of this law, the state should prevent children who are criminals from imprisoning them. The juvenile justice system emphasizes the aspects of fostering children through education, rehabilitation, reintegration and still has to go through a restorative justice approach. The lack of cooperation with social institutions is also an obstacle in itself.

 The problem in this research is how the legal protection for the children in the Class-II B Lubuk Pakam Penitentiary, what are the factors that hinder the provision of legal protection guarantees to prisoners of prison children who are victims of criminal acts in the Class-II B prisons. Lubuk Pakam and what are the efforts made by the Lubuk Pakam Class-II Penitentiary in coaching children assisted residents.

 In this research, the research method used is juridical empirical research, which is a legal research conducted by directly examining and supplemented by reviewing the literature in order to obtain further explanation. The juridical approach means approaching the problem from a legal perspective, namely based on the prevailing laws and regulations. The problem is studied by taking a direct approach at the Lubuk Pakam Class-II Special Guidance Institution, namely in terms of the implementation of guidance, especially the prevention of criminal acts in Juvenile Prisons, then linked to the applicable statutory provisions, namely the Correctional Law and Government Regulation No. 31/1999 in particular Article 2 and Article 3 of the Correctional Law.

 The results of this research and discussion of this thesis, explain that the legal protection of children assisted by children in the Lubuk Pakam Class IIB Penitentiary by giving the rights of the assisted children in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections as stipulated in Article 14 paragraph (1 ). According to the Elucidation of Article 85 Paragraph (2) of Law number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, the rights obtained by the child while being placed in the Special Child Development Institution are given in accordance with the provisions of the Law on Corrections, namely Article 14 paragraph (1), then Class IIB Lubuk Pakam Penitentiary in providing rights to Child Prisoners is appropriate.

***Keywords: Legal Protection, Child Assisted Citizens, Penitentiary***